



PEMBENAHAN TATA PRODUKSI PERTANIAN PANGAN: STRATEGI DAN PRAKTIK MENUJU KEDAULATAN PETANI

Yusup Napiri Maguantara ¹

Abstract

This passage is aimed to reexamine the results of the previous studies related to the strategy, practice, and the peasants' behavior in running their agriculture business, the experienced alternations as well as the impacts of them, and their efforts in overcoming the impacts threatening their lives. In the end, for the writer, such knowledge could be made a basic footstep in formulating the upcoming future plans of studies. It is not impossible that other parties intending to do the similar things could also make the best use of the knowledge.

With the background of peasants' problems, primarily the food producers in Java, AKATIGA, through its studies, is aiming to emerge the ideas enabling the peasants and their supporters to alter the situations, which are of no use to them. The study is also directed to discover the alternatives of developing the agricultural production systems without putting the peasants themselves aside.

Pembuka

Beberapa literatur yang menceritakan situasi dan kondisi petani di Jawa – khususnya sebagai golongan masyarakat yang memproduksi pangan – mengatakan bahwa petani selalu berada dibawah kendali secara

politik, ekonomi, dan sosial dari kelompok non-petani. Melalui kekuasaan raja pada jaman feodal², kekuasaan kolonial³, hingga kewenangan organisasi perdagangan dunia (WTO)⁴, kekuatan kapital yang dimiliki sebagian kecil pengusaha

1 Peneliti pada Yayasan AKATIGA

2 Husken dan White (1989)

3 Jan Breman (1986); ---van Niel (2003); Boogaard (2004)

4 Lihat antara lain Setiawan (2003); Khudori (2004)

mendominasi arah dan kebijakan organisasi produksi usahatani petani-petani produsen. Kebijakan-kebijakan tersebut mengarah pada terciptanya kondisi yang menyebabkan golongan mayoritas petani menjauh dari penguasaan sumber produksi, termasuk tenaganya sendiri, dan memperlemah kemampuan mereka untuk memproduksi secara mandiri.

Dengan lugas Boeke (1922:52) melukiskan kondisi tersebut seperti dikutip Breman (1986), "*...dalam basis masyarakat kolonial ini kita dapat menerima kenyataan adanya dua lapisan, yaitu golongan kaum tani pribumi pada lapisan bawah, dan golongan pengusaha yang orang asing pada lapisan atas, yang menghasilkan dan menunjang kesejahteraan yang ada. Antara kedua lapisan tersebut pada hakikatnya tidak ada hubungan satu sama lain, kecuali bahwa lapisan yang di atas menindas yang di bawah dan menghisap darah kehidupannya....*"

Hal ini persis seperti yang ditampakkan secara animasi dengan baik oleh film "A Bug's Life."⁵ Film tersebut menceritakan suatu penindasan dan eksploitasi yang dilakukan kelompok serangga belalang terhadap kelompok serangga semut, tanpa pernah mempertanyakan mengapa mereka harus menyediakan makanan untuk belalang, sementara kebutuhan pangan untuk mereka sendiri belum

tercukupi. Babak selanjutnya menceritakan munculnya satu ekor semut yang kritis dan mencoba menyadarkan teman-temannya, termasuk ratunya, untuk melawan – bahkan hanya dengan mempertanyakan *kapan kita memproduksi makanan untuk kita sendiri?* Gagasan ini ditolak mentah-mentah karena rasa 'amat takut' atas kekerasan dan hukuman yang akan diberikan kelompok belalang kepada mereka. Bahkan si semut kritis ini diusir dari komunitasnya. Setelah semut kritis melanglang buana dia bertemu dengan jenis serangga lainnya yang dapat hidup 'berdaulat' dan kemudian diajak ke kampung halamannya untuk membantunya meyakinkan komunitas bahwa kalau mereka bersatu bisa melawan belalang (padahal semut terkenal sebagai jenis serangga yang punya organisasi hidup yang kuat). Singkat cerita, akhirnya secara bersama mereka menemukan cara untuk melawan – salah satunya dengan mengenali kelemahannya – dan bersatu padu dengan bantuan teman-teman serangga lainnya... akhirnya kaum belalang dapat diusir... dan kelompok semut merdeka.

Apa yang dapat ditarik menjadi pembelajaran dari film tersebut adalah: 1) bentuk-bentuk penindasan dapat dilawan bahkan dihilangkan; 2) bentuk perlawanan paling sederhana tetapi paling ditakutkan oleh pihak lawan adalah muncul dan berkembangnya ide atau gagasan untuk

⁵ Produksi PIXAR Animation Studio, Walt Disney Home Entertainment Inc. 2004.

melakukan suatu perubahan; 3) gagasan untuk berubah biasanya datang dari seseorang yang kritis (bisa anggota komunitas ataupun luar komunitas) dan berani melakukan penyadaran atas ketertindasan; serta 4) perlu adanya pengorganisasian bagi anggota komunitas dan para pendukungnya untuk melawan kekuatan dominatif.

Berlatar belakang persoalan petani, khususnya produsen pangan di Jawa, AKATIGA melalui studinya bermaksud untuk memunculkan gagasan-gagasan yang memungkinkan bagi petani dan para pendukungnya untuk mengubah situasi tersebut. Studi ini juga diarahkan untuk menemukan alternatif-alternatif pengembangan sistem produksi usahatani tanpa harus meminggirkan petani itu sendiri.

Kami memandang persoalan tata produksi pangan⁶ sebagai persoalan penting dengan tiga alasan. *Pertama*, merujuk pada White dan Husken dalam Hart (1989), persoalan produksi pangan dan penguasaan sumber agraria merupakan dua hal yang penting dan menjadi alat kontrol politik-ekonomi kaum penguasa. Keadaan tersebut sangat memungkinkan bagi munculnya berbagai kepentingan dalam pengaturan pangan dan sekaligus dapat menjadi

titik pijak strategis bagi petani untuk mengubah keadaan.

Kedua, pengaturan tata produksi dianggap menjadi titik lemah di dalam tahapan upaya pengaturan struktur penguasaan sumber-sumber agraria yang lebih adil. Kegagalan dalam mengatur tata produksi disinyalir sebagai salah satu penyebab kembalinya kondisi ketimpangan struktur penguasaan tanah.⁷

Dan *ketiga*, meyakini apa yang dikemukakan Chayanov (1925) seperti dijelaskan oleh Kitching (1982), Kerblay (1971), dan Thorner (1962), bahwa setiap komunitas petani mempunyai tipe dan perilaku ekonomi yang spesifik, berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu upaya menemukan bentuk organisasi produksi yang tepat dapat dijadikan landasan menuju pertumbuhan bersama tanpa meninggalkan keadilan dan pemerataan.

Petani Pedesaan di Jawa: Beberapa Pandangan dan Temuan

Petani

Merujuk pada beberapa hasil studi yang menjelaskan kehidupan masyarakat pedesaan, khususnya pedesaan-pertanian di negara-negara sedang berkembang, terdapat satu

⁶ Tata produksi kami terjemahkan sebagai upaya-upaya untuk mengatur kembali relasi produksi relasi kerja dan relasi produksi sosial – yang terkait dengan bagaimana pangan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi.

⁷ Hasil diskusi dengan beberapa organisasi tani dan LSM pendamping organisasi tani.

golongan masyarakat yang disebut sebagai petani.⁸ *Siapa sesungguhnya mereka dan apa yang menjadi ciri utama mereka sehingga dapat dibedakan dengan golongan masyarakat lainnya?* Berikut akan disampaikan beberapa jawaban yang diberikan oleh para ahli, yang oleh Sayogyo disimpulkan kurang lebih bervariasi, terutama pada situasi yang sedang serba berubah.⁹ Tujuannya adalah melingkupi definisi kerja petani pada penelitian terkait.

Moore (1966:111) mencirikan petani sebagai kelompok yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya dengan melihat posisinya sebagai golongan yang tersubordinasi, mempunyai budaya tersendiri, dan dibedakan berdasarkan derajat penguasaan tanahnya. Pencirian ini dilakukan karena diyakini tidak mungkin mendefinisikan petani dengan ketepatan yang mutlak sehubungan dengan kekaburan batasnya pada ujung kenyataan sosial itu sendiri. Sementara itu, Shanin (1971:15) membatasi masyarakat petani sebagai suatu komunitas pertanian mayoritas berupa petani produsen yang menggunakan peralatan sederhana dan penggunaan tenaga kerja keluarga serta memproduksi untuk kebutuhan mereka sendiri dan sebagian untuk memenuhi kewajibannya kepada

penguasa politik-ekonomi dalam posisinya sebagai kelompok yang tersubordinasi dan tereksplotasi.

Dari kedua ahli tersebut tersebut terdapat satu pandangan yang sama mengenai hubungan petani dengan masyarakat lainnya yaitu sebagai kelompok yang tersubordinasi secara politik dan ekonomi. Atas posisi tersebut, Shanin mensinyalirnya sebagai alasan utama bagi mereka untuk melakukan perlawanan.

Khusus untuk kajian petani di Asia Tenggara, Marzali telah menggolongkan konsep *peasant* yang diacukan kepada sekurang-kurangnya tiga pengertian yang berbeda.¹⁰

Petama, istilah *peasant* digunakan untuk merujuk kepada semua penduduk pedesaan secara umum, tidak peduli apapun pekerjaan mereka. Mewakili pandangan ini antara lain Hart (1986), Hefner (1990), dan Alexander (1991).

Kedua, beberapa orang, antara lain Scott (1981) dan Hashim (1984), membatasi petani terbatas kepada penduduk pedesaan yang bekerja sebagai petani saja. Batasan tersebut mirip dengan Redfield (1985:19), yang melingkupi masyarakat petani sebagai sekelompok orang yang sekurang-kurangnya mempunyai

⁸ Pada semua literatur berbahasa Inggris disebut dengan istilah *peasant*. Dalam tulisan ini kami memadankannya dengan istilah petani.

⁹ Lihat pengantar Sayogyo untuk buku Scott (1993)

¹⁰ Bahan kuliah di Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB, tanpa tahun.

kesamaan dalam cara mencari nafkah dan cara hidup yaitu dengan mengolah tanah.

Ketiga, adalah mereka yang mengikuti batasan Wolf (1985), yang menggunakan konsep *peasant* untuk menunjuk kepada petani yang memiliki tanah dan menggarap sendiri tanah tersebut untuk menghasilkan produk yang digunakan untuk memenuhi keperluan hidupnya, bukan untuk dijual.

Batasan mengenai petani di atas memiliki beberapa kesamaan ciri yaitu menunjuk pada segolongan individu yang mempunyai cara hidup yang khas dengan mengolah tanah untuk menghasilkan pangan, dan oleh karenanya mereka selalu dikendalikan oleh kelompok masyarakat lainnya. Batasan tersebut dapat dijadikan pembeda kelompok petani dengan kelompok masyarakat lainnya. Namun demikian, kekhasan kondisi, ekologi-sosial, dan sejarah kehidupan inilah yang membuat batasan mengenai petani dari daerah tertentu berbeda dengan yang tinggal di daerah lainnya.

Pembatasan yang lebih rinci, terutama dalam masyarakat petani itu sendiri, perlu dilakukan mengingat realitas kondisi masyarakat petani lebih kompleks dibandingkan generalisasinya. Derajat penguasaan tanah yang digarap dan motif berproduksi cukup bisa menggambarkan adanya pelapisan dalam struktur sosial masyarakat tani, sekaligus juga membedakan antara

petani (*peasant*) sebagai cara hidup dengan pengusaha tani (*farmer*) sebagai profesi untuk meraih keuntungan.

Rasionalitas dan Moralitas Petani: Respons Terhadap Perubahan

Perdebatan mengenai respons petani terhadap perubahan tak lepas dari upaya untuk membuktikan bahwa di satu sisi terdapat beberapa masyarakat petani yang mencoba bertahan dengan karakter dasar petani, sementara beberapa lainnya sudah berubah menjadi pengusaha tani. Marzali (2003), mengutip Geertz, menyebut respons tersebut sebagai model dari (*model of*) perilaku masyarakat yang terlihat dalam kenyataan hidup sehari-hari, sekaligus juga model bagi (*model for*) masyarakat tersebut untuk menjawab tantangan yang dibawa ke dalam keseharian mereka yang sedang berubah.

Keterikatan hubungan dengan pasar, meluasnya penggunaan uang sebagai alat tukar, pembedaan keahlian kerja, intensitas hubungan desa-kota, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan penguasa merupakan faktor-faktor yang ditengarai Shanin akan menjadi pengubah karakter tersebut. Meskipun demikian, dengan tegas Shanin mengatakan bahwa seberapa pun derasnya dorongan perubahan tersebut tidak akan menghilangkan dalam dirinya karakter petani sebagai sebuah cara hidup (Shanin, 1971).

Sedangkan Scott menemukan adanya cara hidup petani yang didasarkan pada kolektivitas, gotong royong, dan tolong menolong. Sikap ini dianggap sebagai respons atas struktur sosial ekonomi dan politik yang tidak berpihak dan sekaligus menjadi strategi mempertahankan hidup. Kebijakan pemerintah mengintensifkan usaha tani dan dorongan untuk mengomersialkan hasil-hasilnya dianggap sebagai dua hal yang mengancam kehidupan petani. Oleh karena itu asas pemerataan sangat dipegang kuat. Mereka percaya terhadap hak moral petani untuk dapat hidup berkecukupan (Scott, 1994).

Sementara itu, Popkin menyangkal pendapat tersebut dan memandang Scott terlalu meromantisir kehidupan kolektif dan hubungan patron-klien (Popkin, 1986). Popkin mengatakan bahwa petani, seperti halnya kebanyakan orang, bersifat rasional serta ingin meraih keuntungan dan menjadi kaya jika mempunyai kesempatan memiliki akses yang lebih leluasa terhadap pasar. Perubahan-perubahan yang terjadi di desa bukanlah kolektivitas masyarakat, melainkan pribadi para petani itu sendiri. Terlebih dengan adanya 'penanggung' di desa, yaitu orang-orang yang tidak mau bekerjasama tetapi menikmati hasil-hasil kerja kolektif. Institusi bagi hasil hanya dianggap sebagai sikap enggan pemilik tanah untuk membiarkan petani menjual hasilnya sendiri ke pasar.

Khusus untuk petani di Jawa, Marzali (2003:8-18) menyampaikan cara yang dilakukan petani dalam mengatasi perubahan yang disebabkan keterbatasan tanah dan pertumbuhan penduduk. *Pertama*, bertahan dengan budaya hidup memenuhi kebutuhan minimal, sehingga memperlihatkan pertumbuhan statis, seperti dikemukakan Boeke (1922). Pengimbangan meningkatnya kebutuhan pangan disiasati dengan memperluas tanah pertanian, bukannya meningkatkan produktivitas tanah melalui perubahan teknologi ataupun keahlian tenaga kerja. Pendapat ini mirip dengan pemikiran Chayanov yang mengatakan bahwa keluarga tani mempunyai rasionalitas tersendiri yang berbeda dengan rasionalitas kebanyakan (barat) yang orientasi tindakannya adalah untuk mencapai peningkatan pertumbuhan dan kelebihan nilai ekonomi.

Kedua, strategi involusi dan berbagi kemiskinan ala Geertz (1963). Dalam hal ini, upaya petani untuk meningkatkan produksi dilakukan dengan menambah jumlah tenaga kerja pertanian, yang sekaligus dijadikan cara untuk menyerap angkatan kerja baru. Hal ini dilakukan pada kondisi keterbatasan tanah, sehingga upaya ekspansi tanah pertanian tidak dapat diteruskan lagi. Dengan anggapan bahwa masyarakat pedesaan di Jawa homogen (tidak terstratifikasi), suka menolong, serta mampu menekan standar kebutuhan hidup, yang menjadikan mereka memilih untuk berbagi kemiskinan.

Ketiga, strategi petani rasional dalam masyarakat tradisional seperti ditemukan oleh Hayami dan Kikuchi (1987). Hal ini berbeda dengan analisis kedua ahli di atas yang mendasarkan pola strategi kehidupan petani pada asas resiprositas dan subsistensi yang lebih berorientasi pada moral. Hayami dan Kikuchi juga menolak terbentuknya perilaku rasional yang mengejar keuntungan diri sendiri dan mengabaikan nilai-nilai moral yang berlaku, seperti digambarkan oleh Popkin (1979). Dikatakan juga bahwa kedua rasionalitas tersebut dijalankan bersama-sama bertindak sesuai dengan norma dan moralitas masyarakat yang merupakan cara yang paling tepat untuk menghemat biaya pengelolaan usaha tani. Semuanya tergantung pada situasi dan kondisi tertentu, yang disebut Bernal (1994) sebagai rasionalitas kontekstual. Hanya saja, cara pandang Hayami dan Kikuchi hanya melihat dari sudut petani pemilik tanah yang menghadapi pilihan dilematis antara melanggar atau mematuhi pranata yang ada, demi mendapat keuntungan lebih besar.

Dalam kesimpulannya setelah melakukan studi lapangan, Marzali (2003:237-274) tidak menemui petani yang patuh sama sekali terhadap pranata pedesaan dan juga tidak ada sama sekali yang berkalkulasi rasional. Hanya saja, Marzali tidak membahas mengapa mereka hanya punya pilihan demikian dan apa yang dilakukan pada situasi petani tidak punya pilihan bahkan

hanya untuk memilih jenis yang hendak ditanam.

Beberapa Cara Pandang Tentang Petani

Dalam bukunya, Shanin (1971) menyoroti empat tradisi cara pandang yang digunakan para ahli untuk menganalisis struktur sosial masyarakat petani. *Pertama*, pendekatan teori klas *ala* Marxist. Penganut Marxist berpendapat bahwa karakteristik masyarakat petani dibentuk dalam struktur sosial politik yang ada. Analisis klas digunakan untuk melihat/memposisikan mereka dalam konteks relasi kuasa dalam struktur tersebut. Masyarakat desa masa kini dianggap sebagai sisa-sisa formasi sosial masa lalu (pra-kapitalis), sebagai kelas yang tereksplorasi dalam keseluruhan struktur kekuasaan yang ada.

Kedua, cara pandang kaum neo-populis yang diwakili oleh Chayanov. Kaum neo-populis melihat struktur sosial petani sebagai sebuah tipe ekonomi tertentu yang sangat spesifik, yang kuncinya terletak pada bekerjanya mekanisme 'usaha tani keluarga'.

Ketiga, tradisi berpikir antropologi. Kalangan antropolog cenderung mendudukan *peasant* sebagai bentuk awal dari masyarakat yang bersifat residual seperti halnya masyarakat 'primitif' ataupun 'pemburu-peramu'. Sedangkan Kroeber menempatkan masyarakat petani hidup berhubungan dengan kota-kota

PEMBENAHAN TATA PRODUKSI PERTANIAN PANGAN

pusat pasar, yang mana mereka merupakan bagian dari budaya kota tersebut.

Keempat, dengan menggunakan sudut pandang sosiologi fungsionalis yang merujuk pada pemikiran Durkheim dan Tonnies. Aliran ini memfokuskan perhatian pada proses perubahan secara evolusi dari bentuk masyarakat tradisional (primitif) menuju masyarakat industri (modern). Dalam hal ini, masyarakat primitif dicirikan oleh rendahnya tingkat produksi dan sistem pembagian kerja yang tidak efisien serta mekanisme solidaritas mekanik yang berdasar pada identitas dan kesepakatan diantara anggota masyarakat. Sementara itu masyarakat industri memiliki sistem pembagian kerja yang maju dan terspesialisasi (produksi, distribusi, dan konsumsi) serta mampu membangun solidaritas organik.

Sementara itu untuk melihat artikulasi cara produksi masyarakat petani dapat menggunakan konsep formasi sosial yang berakar pada pemikiran Marx. Konsep ini digunakan oleh Kahn (1973) dalam analisisnya mengenai masyarakat petani Minangkabau. Kahn membedakan tiga cara produksi, yaitu produksi subsisten, produksi komersialis, dan produksi kapitalis sebagai unsur dominan. Merujuk pemikiran Marx (1965) dalam Sitorus (1999), cara produksi subsistensi menghasilkan

barang yang memiliki 'nilai pakai' (*use-value*), sedangkan dua cara produksi lainnya – mencirikan pada gejala komoditisasi – menghasilkan barang yang memiliki 'nilai tukar' (*exchange-value*).

Pada cara produksi komersialis, peranan modal relatif lemah, tenaga kerja umumnya berasal dari lingkungan keluarga, dan organisasi produksinya berupa unit-unit usaha rumah tangga. Sementara pada cara produksi kapitalis, peranan modal relatif kuat, tenaga kerja terutama berasal dari luar rumah tangga, dengan organisasi produksi relatif lebih kompleks yaitu berupa perusahaan skala kecil sampai besar. Sitorus mengatakan secara sederhana 'komersialis tidak dengan sendirinya kapitalis, tetapi kapitalis sudah pasti komersialis'.

Resume

1. Untuk masyarakat petani Indonesia, khususnya Jawa, yang sedang berada dalam proses transisi, ketiga cara produksi tersebut akan ditemui di tataran keyakinan, cara pikir, dan praktik.¹¹ Oleh karena itu tidak dapat dicirikan dengan tegas apakah komunitas mendasarkan cara produksi pada moral subsistensi (seperti dikatakan Scott) atau rasionalitas ekonomi kapitalis (seperti yang diyakini oleh Popkins). Selain itu, intensitas

¹¹ Bandingkan dengan laporan penelitian AKATIGA *Struktur Relasi Agraria* (2001) dan *Pemetaan Situasi Pangan Lokal* (2004), serta Pearse (1980:257)

pertarungan yang berbeda-beda antara satu komunitas dengan yang lain (tergantung pada daya resistensi pada suatu cara produksi) menyebabkan dengan sendirinya cara berproduksi masing-masing yang berbeda.

2. Tidak ada cara pandang yang paling baik dari keempat cara pandang di atas yang dapat menjelaskan dengan tepat masyarakat petani dan perubahan-perubahannya. White (1989) menyarankan sebuah riset empiris yang mempertanyakan penyebab perubahan sebagai proses ekspansi kapital dan kebijakan negara yang mendorong terbentuknya iklim perubahan relasi produksi serta perubahan dari sisi penawaran dan permintaan terhadap produk lokal dan pengadopsian teknologi baru yang memberi karakter baru pada relasi dan organisasi produksi.

Pembangunan Pertanian-Pedesaan dan Perubahan-perubahan yang Terjadi

Beberapa Strategi Pembangunan Pertanian-Pedesaan

Pada masa orde baru paling tidak kita menyaksikan pembangunan pertanian-pedesaan yang sedikit banyak membuat berbagai perubahan dalam masyarakat pedesaan, khususnya di Jawa. Wiradi (1986), mengutip World Bank Sector Policy Paper (1975), mendefinisikan pembangunan pedesaan sebagai

'suatu strategi yang dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi kelompok tertentu dalam masyarakat, yaitu rakyat miskin pedesaan'. Mengingat basis kehidupan masyarakat miskin di pedesaan adalah pertanian, maka konsep pembangunan tersebut tertuju pada mayoritas masyarakat petani.

John Harris (1982:37-38) mengatakan bahwa secara mendasar terdapat tiga cara yang pernah diterapkan di berbagai negara yang bertujuan mencapai sistem produksi pertanian yang lebih produktif dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. *Pertama*, melalui pengembangan sistem pertanian kapitalis dengan skala ekonomi sebagai tujuan utama. Unit usahatani kecil diserap ke dalam bentuk produksi kapitalis skala besar dan kelebihan tenaga kerja diserap oleh industri pedesaan dan sektor jasa. Cara *kedua* adalah dengan mengembangkan unit-unit usahatani skala kecil yang padat modal dengan menerapkan prinsip produktivitas skala usaha dengan dukungan koperasi dalam pengolahan dan pemasaran input dan output pertanian. Dalam hal ini kelebihan buruh pedesaan diserap oleh industri dan sektor jasa. *Ketiga*, melalui inisiatif negara melalui pembentukan koperasi skala besar, kolektivisasi, atau usahatani negara. Kelebihan tenaga kerja pedesaan disalurkan pada kegiatan non pertanian dari koperasi kolektif ataupun industri dan sektor jasa.

Sementara itu, dengan menilik keberhasilan Jepang, Taiwan, dan China, Pearse (180:244) menawarkan penerapan strategi pembangunan pertanian berbasis petani dengan dua kondisi capaian. *Pertama*, pembukaan akses petani penggarap atas tanah secara adil melalui pembatasan luas pemilikan tanah atau dengan unit usaha kolektif disertai pembagian kerja yang proposional dan, *kedua*, mendorong potensi pertumbuhan produksi melalui pembagian permodalan secara adil untuk menghindari akumulasi kekayaan yang dimonopoli sekelompok kecil petani besar.

Lebih lanjut dikatakan, capaian tersebut perlu didukung organisasi produksi petani dan koperasi yang bersama-sama berperan dalam pengaturan produksi dan distribusi hasil. Koperasi, khususnya, mengatur penyimpanan kelebihan hasil setelah kebutuhan pangan terpenuhi dan menginvestasikan pada pengolahan hasil dan fasilitas sosial. Dengan cara demikian tercapai pertumbuhan bersama melalui keadilan, sehingga gejala-gejala munculnya polarisasi secara perlahan berkurang. Strategi tersebut perlu mendapat dukungan politik dari pemerintah, terutama perlindungan dari tekanan politik pasar bebas pangan dunia.

Strategi yang ditawarkan Pearse di atas mirip dengan gagasan Chayanov yang mewakili pandangan utama kaum Neo-populis, bahwa usahatani skala kecil (keluarga) lebih efisien dan produktif dalam memajukan pertanian. Hal tersebut tentu saja

mensyaratkan adanya kondisi penguasaan tanah pertanian oleh keluarga tani. Kitching (1982:54) menjelaskan tahapan pemikiran Chayanov dalam memajukan pertanian sebagai berikut:

1. Membentuk koperasi yang beranggotakan petani-petani kecil. Koperasi ini berfungsi menyediakan berbagai sarana produksi pertanian tertentu yang dibutuhkan.
2. Mengatur dan mengorganisasi penjualan hasil melalui koperasi. *Melalui hal ini dapat dicapai sebuah pertumbuhan kapital secara bersama dan berkembang menjadi kumpulan koperasi.*
3. Membangun organisasi (koperasi) kegiatan pengolahan hasil pertanian yang bekerjasama erat dengan bagian penjualan. *Mekanisme ini dapat memperpendek rantai-rantai distribusi penjualan yang hanya menguntungkan pedagang dan memberi beban biaya baik pada produsen maupun konsumen.*
4. Penggunaan koperasi untuk membesarkan dan mengorganisasi produksi usahatani dalam bentuk baru yang lebih maju dan juga menyebabkan produsen lebih terkendali, perencanaan usahatani lebih tertata serta mengacu pada kebijakan bagian pengolahan hasil dan penjualan, perbaikan teknik usahatani, hingga pengemasan sesuai dengan kebutuhan pasar di luar komunitas.

Revolusi Hijau: Perubahan Agraria yang Merenggut Kedaulatan Petani

Sebagaimana telah berjalan, Revolusi Hijau (RH) menjadi pilihan pembangunan pertanian di Indonesia yang ditujukan untuk mengatasi kekurangan pangan dan bahaya kelaparan serta mengurangi situasi dan kondisi pertanian yang menjadi penghalang pembangunan pedesaan secara keseluruhan. Akan tetapi, tidak demikian menurut White (2002), yang menilai bahwa RH tidak hanya sekedar instrumen ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen politik. Kebijakan agraria tersebut mempunyai dua target utama: 1) mengatasi konflik politik di daerah pedesaan dengan cara memberlakukan strategi 'masa mengambang' dan 2) kebutuhan untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga yang relatif stabil di daerah perkotaan untuk kelas menengah, dengan cara meningkatkan produksi dan ketersediaan stok beras yang aman secara nasional.¹²

Dengan kata lain, pemilihan RH sebagai cara untuk mencapai 'kemajuan' pertanian-pedesaan tidaklah ditujukan untuk kebutuhan pangan dan kesejahteraan petani itu sendiri. Terlebih, ketika kemudian RH mengandaskan begitu saja program *land reform* – yang bertujuan tanah untuk petani – yang pada awal tahun 1960-an sudah berjalan. Sekurangnya

ada tiga ahli dengan rekomendasinya masing-masing – yaitu Geertz (1963), Ladejnsky (1961-1963)¹³, dan Mosher (1966:1974) – yang cukup mempengaruhi arah kebijakan politik ekonomi agraria Indonesia tersebut. Baik secara eksplisit maupun implisit, ketiganya menyarankan perlunya program peningkatan produktivitas pertanian dibandingkan melakukan penataan agraria melalui redistribusi tanah yang akan membahayakan stabilitas politik (White, 2002:62).

Baik kalangan peneliti maupun pengambil kebijakan merasa kagum dengan keberhasilan Indonesia yang dalam waktu relatif singkat mampu mencapai swasembada pangan, yaitu mencukupi kebutuhan pangan dari produksi sendiri. Terlebih lagi keberhasilan ini sebelumnya didahului dengan berbagai pesimisme pemikir dan pemerhati persoalan pertanian pedesaan, khususnya Jawa yang memperoleh cap statis dan enggan tumbuh dan maju.¹⁴

Fenomena tersebut menarik perdebatan di kalangan peneliti, baik asing maupun Indonesia, baik mengenai cara melihat keadaan, bagaimana proses 'keberhasilan' tersebut dilalui, maupun perubahan-perubahan sosial serta dampak yang terjadi (White, 2002). Berbagai penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang sangat beragam, tergantung dari

¹² Lihat Husken dan White (1989:hal 235-36)

¹³ Lihat di Walinsky, L.J (1965)

¹⁴ Geertz (1963) dan Boeke (1982)

masalah utama yang menjadi pusat perhatian, cara pendekatan dan analisis, serta aliran teori yang menjadi dasar pandangan masing-masing.¹⁵

Namun di atas semua itu, bila kita cermati lagi, perdebatan para pakar tersebut pada intinya mengandung dua hal. *Pertama*, bahwa inovasi teknologi dan komersialisasi yang terkandung dalam paket revolusi hijau di Jawa telah mendorong terbentuknya diferensiasi sosial baru yang cenderung memusatkan penguasaan tanah pada petani lapisan atas dan pada saat yang sama mempersempit akses penguasaan tanah bagi petani lapisan bawah. Kesimpulan tersebut diperkuat secara kuantitatif, baik lewat data makro¹⁶ di tingkat nasional maupun data mikro di tingkat desa, yang menggambarkan terjadinya penajaman ketimpangan struktur penguasaan tanah di pedesaan. Bentuk struktur penguasaan tanah di pedesaan sejajar dan sebangun dengan derajat akses dan kesempatan kerja di sektor non-pertanian.¹⁷ Artinya, jika dilihat dari sisi pendapatan, mayoritas petani lapisan bawah di pedesaan yang berpenghasilan kecil dari usahataniya juga cenderung berpenghasilan kecil dari sektor non-

pertanian. Oleh karenanya, Griffin (1979:252-259) dengan tepat menyebut RH sebagai kisah dari kegagalan revolusi. Gagal dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

Kedua, menguatnya bentuk-bentuk organisasi produksi kapitalis yang segala pengaturannya diserahkan pada mekanisme pasar dan sekaligus meredupkan pengaturan bentuk organisasi produksi keluarga yang dilandaskan pada pengetahuan dan pranata-pranata tradisional. Tercepatnya petani dalam sistem pasar yang terdistorsi melalui instrumen subsidi dan harga dasar, mengubah orientasi usahatani untuk pemenuhan pangan sendiri menjadi usahatani komersial, sehingga terjadi ekstraksi hasil produksi pedesaan ke masyarakat kota. Sementara itu, surplus ekonomi pasar dinikmati bukan oleh mayoritas petani produsen kecil, tetapi oleh segelintir elit petani penguasa tanah luas dan aparat pengatur pasar – Bulog dan KUD – dua organisasi baru yang meredupkan peranan lumbung di pedesaan. Fakta inilah yang membawa Booth (1988:7) pada penilaian bahwa RH berhasil meningkatkan produktivitas, tetapi gagal dalam mendistribusikannya.¹⁸

¹⁵ Lihat misalnya Hart (1986); Hart (1989); Husken (1998); Pincus (1996); Hayami dan Kikuchi (1987); White dan Husken (1989); Karsyno (1984); Tjondronegoro dan Wiradi (1984); Booth (1988); Pearse (1980); Griffin (1979); dan Wahono (1999).

¹⁶ Bersumber pada data Sensus Pertanian BPS yang dilakukan dalam rentang waktu 10 tahun sekali

¹⁷ Untuk data makro bandingkan antara Bachriadi (2003:1) dengan data sensus pertanian 2003 (BPS); sedangkan untuk data mikro bandingkan Kasryno (1984:104-130) dengan Laporan Studi Struktur Relasi Agraria AKATIGA khususnya kasus Desa Kebanggan.

¹⁸ Fenomena ini sekaligus membalikkan tesis Geertz yang menyatakan petani Jawa tidak produktif, tetapi

Kedua proses perubahan pertanian-pedesaan di atas kami sebut sebagai perenggutan 'kedaulatan petani', terenggutnya tanah sebagai identitas dan sumber penghidupan utama dari tangan petani. Seperti dikemukakan oleh Wahono (1990), bahwa keterlibatan petani dalam program peningkatan produksi pangan lebih merupakan keterpaksaan ekonomi dan ketakutan atas tekanan pemerintah daripada sebagai upaya petani memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan diri. Fenomena ini dijelaskan sebagai akibat dari perubahan agraris selama masa pertumbuhan pertanian yang relatif cepat dan tidak dilandaskan pada perubahan struktur agraria.¹⁹

Resume

Dari beberapa pendekatan dan cara dalam memajukan pertanian, terlihat adanya kesamaan pandangan, sebagai berikut: 1) mengisyaratkan peran pemerintah dalam memberi arah capaian yang jelas, 2) perbedaan mendasar dalam memilih adalah apakah mencapai kemajuan dengan mengembangkan organisasi produksi skala besar seperti dilakukan kalangan kapitalis dan sosialis, atau dengan menguatkan satuan-satuan usahatani kecil berbasis keluarga seperti gagasan neo-populis, dan 3) keberhasilan memajukan pertanian, baik memakai pendekatan usaha besar

ataupun kecil mensyaratkan terlebih dahulu pentingnya penataan sumber-sumber agraria sebagai basis pengorganisasian produksi. Hal ini berbeda dengan pemajuan pertanian ala Revolusi Hijau.

Hanya dengan menguasai tanahlah kedaulatan petani atas pangan dan kehidupannya dapat terwujud. Ketika hal ini yang dijadikan arah capaian pembangunan pertanian-pedesaan, maka gagasan kaum neo-populislah yang dijadikan pilihan. Pada pandangan tersebut terdapat basis tata produksi yang bisa mencapai keseimbangan produksi dan distribusi yang adil tanpa harus menghilangkan pengetahuan dan interaksi sosial agraria yang terdapat dalam masyarakat.

Penutup

Merujuk pada beberapa kesimpulan di atas, petani lapisan bawah di pedesaan – petani gurem, tunakisma, dan buruh tani – sedang menanggung perubahan situasi yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Seperangkat cara dan prosedur (resep) yang harus mereka jalankan – panca usahatani, bimas, inmas, KUD, dan Bulog – untuk meningkatkan produksi pangan telah mencerabut pengetahuan dan pranata-pranata yang mereka miliki sebelumnya. Proses tersebut pada intinya menghancurkan basis-basis

mereka mendistribusikan hasilnya dengan baik.

¹⁹ Lihat Husken dan White (1989) dan Sobhan (1993)

pengorganisasian produksi – produksi, konsumsi, dan distribusi – yang cocok dan biasa mereka lakukan dalam mencapai kelestarian hasil dan penghidupan.

Dalam situasi demikian, yang serba kalah dan terjepit, masih adakah ruang untuk banyak petani lapisan bawah agar secara bersama-sama dapat keluar dari persoalan? Apa yang bisa mereka lakukan dan mulai dari mana? Serta "Strategi dan cara yang bisa dilakukan petani adalah bertahan, sebab saat ini memang belum mampu melawan kekuatan kapital global. Bentuk praktisnya adalah seperti gerakan petani yang melakukan pertanian alami dan mengkonsumsi produksi pangan untuk dirinya sendiri, tidak untuk dijual. Bagi petani yang tak punya alat produksi berjuang untuk itu, sementara yang sudah punya berupaya untuk mempertahankannya", demikian menurut GWR.²⁰ Pendapatnya seperti dinyatakan Scott sebagai senjata kaum lemah. Perlawanan yang dilakukan tidak untuk mengubah, apalagi menumbangkan sistem dominasi. Tujuan mereka hanyalah untuk bertahan diri dalam sistem itu, dengan kerugian sekecil-kecilnya dan dilakukan tanpa henti.

Gerakan untuk 'kembali' pada sistem usahatani alami-tradisional mengisyaratkan perlunya melakukan pem-

benahan tata produksi – sisi produksi, distribusi, dan konsumsi – berbasis pengetahuan dan relasi-relasi agraria yang sebelumnya sudah mereka kuasai dan praktikkan. Berikut saya sampaikan pengalaman sebuah organisasi tani yang kemudian mengubah diri menjadi LSM dalam mempraktikkan pertanian alami-tradisional. Cara ini saya ungkapkan kembali²¹ mengingat adanya beragam variasi motif dan tujuan praktik pertanian alami yang sering disamakan dengan pertanian organik. Model tersebut lebih berorientasi ke dalam serta meminimalkan ketergantungan terhadap pihak lain yang sekaligus mengurangi biaya produksi. Sementara model yang lain berorientasi pada pasar serta meningkatnya kebutuhan pangan sehat bagi masyarakat kota.

Pertanian Alami-Tradisional Terpadu: Menemukan Titik Pijakan Bersama

Sementara persilangan pendapat diantara ahli mengenai apa yang telah terjadi di pedesaan masih terus berlangsung, para petani miskin tetap terus berusaha mencari jalan keluar dari berbagai persoalan yang melilitnya. Sekelompok petani 'terdidik', melalui beberapa proses pelatihan dan diskusi dengan pihak lain, berpikir dan mencoba merumuskan masalah serta tindakan yang perlu dilakukan untuk melindungi dan memperbaiki kehidupannya. Merujuk pada pesan film "A

²⁰ GWR: Gunawan Wiradi dalam sebuah komunikasi pribadi

²¹ Pengalaman ini pernah dituliskan sebelumnya. Lihat Napiri (2002)

Bug's Life" di depan, cara demikian merupakan bentuk perlawanan yang paling sederhana tetapi paling ditakuti pihak lawan. Titik pijaknya sederhana saja, yakni pengalaman hidup sehari-hari dan keinginan bertahan hidup.

Bertolak pada apa yang dilakukan oleh program revolusi hijau terhadap petani melalui paket panca usahatani²² yang telah mencabut budaya bertani yang selama ini dijalankan, secara perlahan-lahan petani membiasakan dirinya hanya menanam padi sampai tiga kali tanam setiap tahun, menyingkirkan bibit lokal yang lebih rendah produktivitasnya, lebih memilih pupuk kimia yang secara instan dapat langsung dipakai, menggunakan pestisida yang dapat secara ampuh memberantas hama dan penyakit, dan seterusnya. Singkat kata, petani sudah mengalami ketergantungan terhadap teknologi pertanian yang semua kebutuhannya, kecuali tenaganya sendiri, diadakan oleh pihak lain dan harus menge-luarkan uang untuk mendapatkannya. Sebagai konsekuensinya, petani kemudian mempertukarkan sebagian hasil berasnya untuk mendapatkan sarana produksi pertanian tersebut, sehingga tanpa sadar telah tergiring kepada budaya produksi komersial.²³

Kegelisahan petani muncul pada saat daya dukung lahan telah melewati batas maksimal sehingga produkti-

vas lahan kemudian cenderung menurun. Kondisi tersebut diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan petani kecil, misalnya kebijakan pengurangan subsidi pupuk dan melakukan penjualan beras impor murah pada saat panen raya. Sementara itu, perkembangan di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi hingga ke tingkat pedesaan semakin menambah beban pengeluaran bagi petani.

Semakin saratnya beban biaya hidup secara langsung telah mengancam sumber-sumber penghidupan petani. Bagi petani kecil dengan lahan sempit serta buruh tani, selain mengurangi konsumsi, kegiatan usaha di luar pertanian merupakan salah satu cara yang dilakukan. Bila upaya tersebut belum mencukupi maka mereka mulai menjual aset yang dimiliki, termasuk tanah yang menjadi alat produksi utamanya.

Berpijak pada keprihatinan tersebut, muncul gagasan untuk mencoba keluar dari perangkap revolusi hijau dengan mengembalikan cara berbudidaya tani secara tradisional dan alami seperti sebelumnya. Pertanian alami menjadi sebuah alternatif sistem pertanian baru berdasar pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dan diyakini dapat mengantarkan petani dan sistem

22 Penggunaan pupuk 'kimia' berimbang, penanaman bibit unggul/VUTW, penggunaan pestisida 'kimia' untuk penanggulangan hama terpadu, dukungan irigasi dan perbaikan teknologi pengolahan lahan 'mekanisasi'

23 Bandingkan dengan Kahn (1974)

pertanian menuju kemandirian penghidupan.

Secara sederhana kemandirian petani dapat dilihat pada kemampuan mereka untuk memproduksi pupuk sendiri dan kemudian juga berani menentukan sendiri jenis tanaman yang akan ditanam. Perlu ditambahkan sebagai catatan, bahwa berbagai macam tantangan dan hambatan mewarnai 'perjuangan' untuk mencapai hal tersebut. Terutama dari pihak pemerintah saat itu yang selalu mencurigai segala sesuatu yang bertentangan dengan aturan dan anjuran program pertanian pemerintah. Bahkan gerakan kembali ke pertanian tradisional ini sempat dicurigai sebagai gerakan bawah tanah.

Mengembangkan Gagasan Perlawanan dan Rasa Percaya Diri

Gagasan perlawanan tersirat pada pertanian alami-tradisional itu sendiri dan menjadi sebuah alternatif cara bertani di luar cara kebanyakan saat ini. Tradisional seringkali dilawankan dengan modern. Dalam konteks ini, mereka mengembangkan gagasan bahwa pertanian dengan teknologi modern hanya dapat dilakukan oleh sebagian kecil petani yang kaya. Sebaliknya, kembali kepada sistem tradisional diharapkan dapat diadopsi dengan cepat untuk semua golongan. Alami dipertentangkan dengan pabrikan kimiawi, khususnya untuk penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh petani, harganya mahal, dan

daya rusaknya besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini, pupuk dan pestisida alami kembali digunakan dengan bahan baku yang terdapat di sekitar tanpa perlu 'membeli' dan mudah dalam pembuatannya.

Istilah 'terpadu' diletakkan pada kenyataan bahwa sebuah sistem produksi pertanian tidak dapat dilepaskan dengan bagian lain yang terkait, terutama penanganan saat lepas panen, distribusi, dan konsumsi. Selain itu terdapat faktor pendukung lain yang juga memerlukan perhatian, yaitu kekuatan organisasi tani dan kerjasama dengan pihak lain seperti masyarakat non-petani, pemerintah, lembaga donor, dan jaringan organisasi tani di tingkat nasional maupun internasional. Dengan itu diharapkan akan terbentuk kekuatan kolektif dalam menumbuhkan kembali kemandirian petani dalam bertindak dan menentukan jalan penghidupannya.

Menghidupkan kembali lumbung, pranata asli yang menghilang pada masa revolusi hijau, menjadi titik strategis dalam konsep pertanian alami-tradisional terpadu. Lumbung menjadi jangkar pengikat kepaduan tiga serangkai produksi, distribusi, dan konsumsi. Konsep lumbung sejajar dengan konsep koperasi sebagai pengikat konsentrasi vertikal ala neo-populis. Pada konsep ini terletak pengaturan pemanfaatan hasil untuk konsumsi, pengaturan distribusi hasil, penyediaan input, dan penyimpanan cadangan pangan ketika krisis terjadi. Lumbung

memayungi satuan-satuan usahatani keluarga anggotanya. Lumbung juga menjadi basis pengorganisasian tani, sebagai media 'bertemunya' petani baik dalam satu kelompok maupun antar kelompok. Dalam konteks wilayah yang lebih luas, yaitu antar kelompok tani, dibentuk organisasi antar lumbung, yaitu pasar tani alami yang beranggotakan lumbung-lumbung kelompok tani. Dalam perannya sebagai jangkar, lumbung menjadi media pertemuan dengan kelompok masyarakat non-petani sebagai konsumen, sekaligus juga mungkin pemasok sarana produksi pertanian. Catatan terakhir yang penting adalah, manajer pengelola lumbung adalah perempuan.

Dalam praktik, pertanian alami-tradisional terpadu menemui banyak rintangan, terutama dalam menamakan rasa percaya diri kepada keluarga tani lainnya bahwa model ini tidak membawa kerugian bagi mereka. Para pelopor gerakan ini memerlukan waktu setidaknya tiga musim tanam untuk membuktikan produktivitas panennya dapat mengimbangi produktivitas petani yang menggunakan budidaya dan input 'modern'. Sungguh tidak mudah untuk mengembalikan kesuburan tanah yang sudah terbiasa mendapat masukan pupuk kimia dengan menggantikan kompos alami buatan sendiri, demikian menurut mereka. Setelah demplot terbukti berhasil dan terdengar meluas, kemudian semakin banyak kelompok tani lainnya yang mengikuti gerakan tersebut. Namun demikian, keberhasilan dalam sisi

produksi ternyata belum menjangar pada sisi distribusi dan konsumsi. Masih kuatnya mekanisme pasar ditengarai menjadi penyebab belum percayanya keluarga tani pada konsep lumbung.

Apa yang akan dilakukan AKATIGA

Kembali pada sistem usahatani alami berbasis pada pengetahuan mereka sebelumnya merupakan salah satu alternatif, setidaknya untuk melindungi dan mengurangi tekanan perluasan ekonomi pasar di pedesaan. Alternatif lain adalah mengubah arah pembangunan pertanian dengan mengintensifkan sistem produksi usahatani kecil, mengikuti gagasan dari kalangan pemikir neo-populis. Perubahan cara pandang tersebut meniscayakan adanya penguasaan tanah bagi setiap petani penggarap sebagai basis kedaulatan petani.

Berlatar belakang persoalan petani, khususnya produsen pangan di Jawa, AKATIGA melalui studinya bermaksud untuk memeriksa kembali gagasan dan praktik yang telah dilakukan yang memungkinkan petani mencapai kehidupan yang lebih baik dan berdaulat. Sebagai langkah awal, AKATIGA sudah mengawalinya dengan melakukan studi situasi lokal mengenai kemungkinan dan hambatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan bagi petani.

Daftar Bacaan

- Bachriadi, D. 2003. Arti Penting Studi Mikro Ketimpangan Penguasaan Tanah Bagi Gerakan Pembaruan Agraria, Makalah yang disampaikan dalam lokakarya Hasil Penelitian Struktur Relasi Agraria yang diselenggarakan AKATIGA di Bandung, 10 Juni 2003.
- Boeke, J.H. 1982. "Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda", dalam Sayogyo (Peny.). *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Boomgaard, P. 2004. *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. Jakarta: Djambatan.
- Booth, A. 1988. "Agricultural Development in Indonesia". *Asian Studies Association of Australia: Southeast Asia Publication Series No 16*.
- Breman, J. 1986. *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES.
- Collier, W.L, dkk. 1993. A New Approach to Rural Development in Java: Twenty Five Years of Village Study. Submitted to: ILO Sectoral Employment Policy and Planning Project. Tidak Diterbitkan.
- Dewey, A.G. 1962. *Peasant Marketing in Java*. New York: Free Press.
- Fadjar P. 2000. *Gerakan Rakyat Kelaparan: Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Firmansyah, dkk. 1999. *Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi Petani di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Petani Era 1980-an*. Jakarta: Yappika dan Sekretariat Bina Desa.
- Gamst, F.C. 1974. *Peasant in Complex Society: Basic Anthropology Units*. New York: Holt, Rinehart, And Winston, Inc.
- Geertz, C. 1963. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Bhratara Karya Aksara.
- Griffin, Keith. 1979. *The Political Economy of Agrarian Change*^{2nd} Edition. London: The MacMillan Press Ltd.

- Harris, Jonh (ed). 1982. *Rural Development: Theories of Peasant Economy and Agrarian Change*.
- Hart, G. 1986. *Power, Labor, and Livelihood: Processes of Change in Rural Java*. California: University of California Press.
- Hart, G., et all. (Eds.). 1989. *Agrarian Transformation: Local Processes and The State in Southeast Asia*. London: University of California Press, Ltd.
- Hasyim, W. 1988. *Peasant: under Peripheral Capitalism*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Hayami, Y., dan Masao Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hefner, R.W. 1999. *Geger Tengger: Perubahan sosial dan Perkelahian Politik*. Yogyakarta: LKIS.
- Huizer, G. 1999. Peasant Mobilization for Land Reform: Historical Case Studies and Theoretical Considerations. Discussion Paper No. 103.
- Husken, Frans. 1998. *Masyarakat Desa Dalam Perubahan Jaman: Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Jakarta: Grasindo.
- Husken, F. dan Benjamin White. 1989. "Java: Social Differentiation, Food Production, and Agrarian Control," dalam Hart, G., et all. (Eds.). *Agrarian Transformation: Local Processes and The State in Southeast Asia*. London: University of California Press, Ltd.
- Husken, Frans dan Benjamin White. 1989. "Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan Struktur Agraria di Jawa". *Majalah Prisma No 4 Tahun XVIII*. Jakarta: LP3ES.
- Indrawati Sari, Y dan Tri H.S. 2004. Langkah Awal Memprakarsai Pembentukan Sistem Pangan Lokal. Draft Working Paper. Akan Diterbitkan. AKATIGA dan KRKP.
- Joao Pedro de Campos Guimaraes. 2002. A Landscape of Contracts: The Organisation and Impact of Shrimp Culture in Southwest Bangladesh. Disertation. Tidak Diterbitkan. Utrecht University.

PEMBENAHAN TATA PRODUKSI PERTANIAN PANGAN

- Kahn, Joel S. 1974. *Economic Integration and The Peasant Economy: The Minangkabau (Indonesia)*. London: Blacksmith, London. University of London (Disertasi).
- Kano, Hiroyoshi. 1986. "Sejarah Ekonomi Masyarakat Pedesaan Jawa: Suatu Penafsiran kembali," dalam Nagazumi, Akira. *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kano, Hiroyoshi. 1990. *Pagelaran: Anatomi Sosial Ekonomi Pelapisan Masyarakat Tani di Sebuah Desa Jawa Timur*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kartodirdjo, S. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kasdi, A. 2001. *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Yogyakarta: Jendela.
- Kasryno, F (Peny). 1984. *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kerblay, B. 1971. "Chayanov and the Theory of Peasantry as a Specific Type of Economy", dalam Shanin, T (ed). *Peasant and Peasant Society: Selected Readings*. Great Britain: Penguin Books.
- Khudori. 2004. *Neoliberalisme Menumpas Petani: Menyingkap Kejahatan Industri Pangan*. Yogyakarta: Resist Book.
- Kitching, G. 1982. *Development and Underdevelopment in Historical Perspective*. London: Methuen & Co Ltd.
- Kuhren, F. 1993. "Struktur Pertanian", dalam *Sosiologi Pertanian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Landsberger, Henry A., dan YU. G. Alexandrov. 1981. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Marzali, A. tt. "Konsep Peisan dan Kajian Masyarakat Pedesaan di Indonesia". *Antropologi No 54. Universitas Indonesia*.

- Marzali, Amri. 2003. *Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moore, Barrington. 1966. *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Penguin Books.
- Mosher, A.T. 1966. *Getting Agriculture Moving: Essentials for Development and Modernization*. New York: Frederick A. Praeger.
- Mosher, A.T. 1974. *Menciptakan Struktur Pedesaan Progresif untuk Melayani Pertanian Modern*. Jakarta: C.V. Yasaguna.
- Napiri, Y. 2002. Evaluasi Program Sustainable Livelihood OXFAM GB di Beberapa LSM Pendamping Petani di Jawa. Laporan Penelitian AKATIGA. Tidak Diterbitkan.
- Padmo, S. 2000. *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*. Yogyakarta: Media Pressindo dan Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Pearse, A. 1980. *Seeds of Plenty, Seeds of Want: Social and Economic Implication of The Green Revolution*. New York: Oxford University Press.
- Pincus, J.R. 1996. *Class Power and Agrarian Change*. London: Macmillan Press, Ltd.
- Popkin, Samuel L. 1986. *Petani Rasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri.
- Powelson, John P, and Richard Stock. 1987. *The Peasant Betrayed: Agriculture and Land Reform in the Third World*. Boston: Oelgeschlager, Gunn & Hain in association with the Lincoln Institute of Land Policy.
- Pratikto, F. 2000. *Gerakan Rakyat Kelaparan, Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Redfield, R. 1985. *Masyarakat Petani dan Kebudayaan, Terjemahan Cetakan kedua*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sadikin dan Subekti Mahanani. 2004. Struktur Relasi Agraria di Tiga Desa: Kebanggan, Wanasari, dan Terbanggi Besar. *Draft Working Paper*. Belum Diterbitkan.

PEMBENAHAN TATA PRODUKSI PERTANIAN PANGAN

- Scott, J.C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah, Cetakan I*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, J.S. 1994. *Moral ekonomi petani, pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta.
- Shanin, T (ed). 1971. *Peasant and Peasant Society: Selected Readings*. Great Britain: Penguin Books.
- Sitorus MTF. 1999. Pembentukan Golongan Pengusaha Lokal di Indonesia: Pengusaha Tenun dalam Masyarakat Batak Toba. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor .
- Sitorus, M.T.F, dkk. 2001. *Agribisnis Berbasis Komunitas: Sinergi Modal Ekonomi dan Modal Sosial*. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.
- Sobhan, Rohman. 1993. *Agrarian Reform and Social Transformation: Precondition for Development*. London and New Jersey: Zed Book.
- Thorner, D. 1971. "Peasant Economy as a Category in Economic History" (1962), dalam Shanin, T (ed). *Peasant and Peasant Society: Selected Readings*. Great Britain: Penguin Books.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1999. *Sosiologi Agraria: Kumpulan Tulisan Terpilih*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Tjondronegoro, S.M.P., dan Gunawan Wiradi (Peny.). 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Van Niel, Robert. 2003. *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. Jakarta: LP3ES.
- Victoria Bernal. 1994. "Peasant, Capitalism, and (Ir)rationality". *American Ethnologist* 21 (4): 792-810, *American Anthropology Association*.
- Wahono, F. 1999. "Revolusi Hijau: Dari Perangkap Involusi ke Perangkap Globalisasi". *Jurnal Wacana No IV INSIST Press*.
- Wahono, F.,dkk. 2003. *Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: INSIST Press.

- Walinsky, L.J (Ed). 1965. *The Selected Papers of Wolf Ladejinsky: Agrarian Reform as Unfinished Business*. London: Oxford University Press.
- White, Ben. 2002. "Agrarian Debates and Agrarian Research in Java, Past and Present", dalam Suhendar, dkk (ed.). *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung: AKATIGA.
- Wiradi, G. 1986. Kepenguasaan Tanah dalam Perspektif Transformasi Struktural. Makalah yang disampaikan dalam KIPNAS-IV, Jakarta.
- Wiradi, Gunawan. 1993. Karya Chayanov Ditinjau Kembali. Bahan Diskusi ISI Cabang Bogor. Tidak Diterbitkan.
- Wiradi, Gunawan. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Wolf, E. 1985. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.

